

## MENGUAK KEKUATAN TERSEMBUNYI: HUKUM SEBAGAI MESIN KONTROL SOSIAL DAN STRATEGI MACHIAVELLIAN DALAM PERGULATAN KEPEMIMPINAN KONTEMPORER



Diterima: 10 Desember 2023; Direvisi: 22 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

*Amam Masyhur Atho'illah<sup>1</sup>*

### **Abstrak**

*Jurnal ini melihat bagaimana hukum, dinamika masyarakat, dan strategi Machiavellian berinteraksi satu sama lain dalam bidang kepemimpinan modern. Narasi berkembang melalui analisis menarik tentang peran transformatif hukum sebagai penggerak perubahan sosial. Ini dikombinasikan dengan kompleksitas taktik kepemimpinan Machiavellian. Machiavelli percaya bahwa para pemimpin harus menggunakan perilaku manipulatif, dan analitis dalam upaya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Penelitian ini meneliti bagaimana kekuatan ini bekerja sama dengan pengendalian sosial dan pertimbangan etika dengan memasukkan situasi dunia nyata dan konteks teoretis. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan yang kompleks yang membentuk lingkungan kepemimpinan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif karena termasuk dalam penelitian hukum doktrinal.*

**Kata Kunci:** *Kepemimpinan Machiavellian, Hukum, Pengendalian Sosial, Pertimbangan Etika*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, [almasyhurc.25th@gmail.com](mailto:almasyhurc.25th@gmail.com)

## A. Latar Belakang

Dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum (Rechstaat) dan bukan kekuasaan (Machstaat). Hukum juga berfungsi sebagai garis besar untuk pemimpin. Dinamika hukum, perubahan sosial yang cepat, dan arah kebijakan yang tak terduga adalah beberapa tantangan kompleks yang dihadapi oleh para pemimpin di panggung kepemimpinan modern (Fredrick Schauer, 2015). Machiavellianisme menjelaskan seseorang pemimpin dapat menggunakan perilaku amoral, manipulatif, dan analitis dalam upaya untuk memperoleh, memerintah dan mempertahankan kekuasaan.

Machiavellian mengungkapkan dinamika seseorang yang cerdas dan taktis dalam pergulatan kepemimpinan modern. Metode ini, yang berasal dari teori Machiavelli, menekankan betapa pentingnya perilaku manipulatif dan analitis bagi pemimpin dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dalam situasi ini, kepemimpinan Machiavellian menonjol sebagai strategi yang tidak hanya mempertimbangkan kebijakan dan tujuan, tetapi juga memanfaatkan kelemahan situasi untuk membuat langkah-langkah yang optimal dalam persaingan kekuasaan. Ini, meskipun seringkali kontroversial, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana para pemimpin dapat memanfaatkan taktik strategis dan kecerdasan politik untuk menghadapi tantangan yang kompleks di panggung kepemimpinan modern (James Burnham, 2013).

Di tahun 1970-an dan 80-an, Machiavellianisme menjadi topik studi yang populer. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, popularitasnya mulai menurun. Dalam studi perilaku mempelajari sifat kepemimpinan, pekerjaan, keyakinan, dan taktik manipulatif semua dipelajari secara menyeluruh. Selama empat puluh tahun terakhir, peneliti perilaku telah memperhatikan teori Machiavellian. Banyak peneliti telah berhasil menyelidiki banyak variabel dan perbedaan antara orang dengan Mach rendah dan tinggi, tetapi hanya sedikit yang mencoba menyelidiki hubungan antara variabel-variabel ini. Orang dengan Mach tinggi sering dianggap memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, terutama dalam memahami orang lain dalam konteks sosial (Penticuff, Logan Taylor, 2016). Tidak semua orang setuju tentang hubungan antara skor Mach dan kecerdasan superior. Namun, beberapa orang mengaitkan kemampuan manipulatif mereka dengan regulasi implus superior. Dalam sebagian besar interaksi sosial, kemampuan manipulatif dianggap kurang diminati. Namun, karena mereka bersedia menggunakan taktik manipulatif terhadap pesaing mereka, mereka lebih disukai sebagai mitra debat, yang membuat mereka lebih beruntung. Studi yang menarik telah menemukan bahwa pemimpin dengan Mach yang tinggi lebih disukai karena mereka dianggap lebih efektif, cerdas, menarik, dan tenang saat menghadapi tantangan yang lebih besar. Tidak selalu individu dengan Mach tinggi memanipulasi seseorang; sebaliknya, mereka adaptif dan akan berperilaku prososial jika mereka merasa bahwa membaur akan mempercepat minat dan tujuan mereka. Meskipun Machiavellianisme cenderung menyebabkan niat dan tindakan yang tidak etis. Selain itu, ketika seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk mengendalikan masyarakat secara keseluruhan, manfaat kepemimpinan Machiavellianisme pada pemerintahan menjadi lebih kecil dan lebih sedikit.

Jika dalam era modern, penyelenggaraan Rule of law dalam suatu negara sangat sulit memisahkannya dengan segi politik negara. Keadaan politik tersebut memberikan corak tersendiri dalam penegakan hukum, bahkan dapat diterapkan sebagai pedoman pemerintah untuk mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (Andi Hamzah, 2017). Bahan utama pembahasan jurnal ini akan lebih fokus ke Kepemimpinan Machiavellianisme dalam menggunakan hukum sebagai kontrol sosial. dalam lensa teori kekuasaan Machiavellianisme muncul sebagai langka agar pemerintah tau cara manipulatif dalam berupaya memanipulasi masyarakatnya agar menganggap hukum sebagai sesuatu yang harus dipatuhi dan ditegakkan. Teori sosial

konstruksi memberikan gambaran tentang bagaimana Machiavellianisme membentuk realitas sosial. Pemerintah menciptakan konstruksi sosial melalui manipulasi narasi dan citra hukum. Ini menghasilkan gagasan bahwa ketaatan terhadap hukum adalah bagian penting dari nilai-nilai dan norma masyarakat. Namun demikian, ketika berbicara tentang pengaruh Machiavellianisme harus dipertimbangkan, Strategi ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam sistem hukum karena menetapkan aturan yang lebih menguntungkan pemerintah daripada kepentingan umum. Maka dari situlah harus ada ukuran Machiavellianisme atas kebijakan hukum itu sendiri.

Machiavellianisme hukum mempelajari hukum dalam konteks sosial, tentang hubungan antara masyarakat dan hukum, mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik hukum dengan masyarakat yang menganggap sangat penting. Machiavellianisme hukum sebagai kontrol masyarakat dalam arti bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya perubahan faktor-faktor tersebut di atas, maka hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik konflik dan ketimpangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban masyarakat (Tyler, Tom R. 2002). Kontrol sosial dalam Machiavellian Hukum yang baik berarti mengupayakan untuk menciptakan kondisi yang seimbang dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan keadaan yang harmonis antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Intinya adalah hukum sebagai sarana memelihara ketertiban dan mencapai keadilan. Kontrol sosial mencakup semua kekuatan yang menciptakan dan mempertahankan ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksaan yang melindungi warga negara dari tindakan dan ancaman yang membahayakan diri dan harta bendanya (Auerbech, Jerold S. 2002).

Penelitian terbaru ini lebih menjabarkan Machiavellianisme Hukum dari ranah control sosial. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hanya membahas tentang Machiavellianisme secara umum saja. Akan tetapi dari isi materi muatan, penelitian terbaru Penelitian terbaru ini lebih menjabarkan Machiavellianisme Hukum dari ranah control sosial. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hanya membahas tentang Machiavellianisme secara umum saja. Akan tetapi dari isi materi muatan, penelitian terbaru ini akan menjelaskan lebih spesifik Machiavellianisme Hukum dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada Machiavellianisme secara umum.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan hal ini dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. dan meliputi penelitian tentang asas hukum, yaitu penelitian tentang hukum positif tertulis atau penelitian tentang hukum positif tertulis dan aturan hukum yang hidup dalam masyarakat, sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat ilmiah.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Dalam Machiavellianisme pemerintahan yang kuat adalah tujuan dari semuanya. Machiavellianisme ingin menetapkan aturan hukum dan langkah-langkah dalam permainan politik yang abadi. Menurut Machiavellianisme kebaikan moral terbesar adalah bijak (Virtuous), stabil, serta mampu melakukan tindakan-tindakan apapun yang dapat melindungi negara. Betapapun itu kejam, tetapi selama untuk kepentingan negara, itu dapat dibenarkan. Yang terpenting adalah bagaimana memikirkan sesuatu untuk melakukan sesuatu untuk melindungi sesuatu (Niccolo Machiavelli, 2018).

### **Machiavellinisme Hukum sebagai Kontrol Sosial**

Menurut perspektif normatif, orang yang menanggapi kesesuaian moral dari hukum yang berbeda mungkin (misalnya) mencuri, penggunaan narkoba atau melakukan praktik seksual merupakan hal ilegal, seseorang pasti merasa bahwa perilaku ini tidak bermoral, pada saat yang sama seseorang juga akan menahan diri untuk tidak mencuri. Demikian pula, jika mereka menganggap otoritas hukum lebih sah lemah, mereka cenderung melanggar hukum apa pun, karena mereka akan percaya bahwa mereka tidak harus mengikuti semuanya, terlepas dari potensi hukumannya. Di sisi lain, orang yang membuat keputusan penting untuk mematuhi berbagai undang-undang akan memiliki tingkat kepatuhan yang ditentukan oleh perkiraan mereka tentang kemungkinan bahwa mereka akan dihukum jika tidak mematuhi. Seseorang yang melebihi batas kecepatan, mengira kemungkinan tertangkap karena ngebut rendah, tetapi tidak merampok bank, mengira kemungkinan tertangkap lebih tinggi. Bahkan di luar pengaruh hukum, norma-norma sosial dan etika tampaknya berperan besar dalam membentuk perilaku masyarakat (Tyler, Tom R. 2006).

Paradigma berubah dengan figur pemerintahan yang menggunakan metode Machiavellian. Manipulatif yang digunakan adalah cara yang cerdas untuk mengontrol sosial dan sesuai dengan standar. Dengan figur pemerintahan yang memiliki sifat Machiavellian, mereka dapat memahami bahwa kekuatan dan kontrol dapat dicapai melalui kekuatan psikologis tanpa menggunakan kekuatan fisik atau ancaman yang sebenarnya. Ketika pemerintahan muncul dengan strategi Machiavellian, pemahaman kita tentang kontrol sosial berubah. Strategi ini tidak hanya melibatkan manipulasi kepatuhan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang norma-norma yang diinginkan pemerintah. Pemerintahan Machiavellian dapat membentuk struktur sosial sesuai dengan visinya dengan memanfaatkan psikologi masyarakat dan memahami dinamika kepatuhan sukarela. Meskipun metode ini tampaknya bijaksana dalam memaksa kepatuhan dengan meminimalkan biaya sumber daya, perlu diakui bahwa penggunaan keahlian manipulatif dapat menimbulkan masalah etis. Apakah kontrol sosial yang etis adalah memanipulasi persepsi masyarakat untuk kepentingan pemerintah?, bagaimana cara mengukur perbedaan antara pengaruh psikologis yang sah dan manipulasi yang tidak etis?. Dengan kata lain, meskipun metode Machiavellian untuk pemerintahan efektif dalam mencapai kepatuhan sukarela, analisis etis mendalam diperlukan untuk menilai dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Meskipun metode ini efektif, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kontrol sosial yang diinginkan dan hak-hak individu dalam suatu masyarakat.

Dari perspektif pihak berwenang, kepatuhan sukarela terhadap hukum memiliki sejumlah keuntungan. Jika petugas polisi dan hakim perlu memaksa masyarakat untuk patuh dengan mengancam atau menggunakan kekerasan, mereka harus mengeluarkan banyak sumber daya. Biaya kepatuhan sukarela akan hukum jauh lebih murah dan, akibatnya, sangat dihargai oleh otoritas hukum (Aurelius, Ata Luon dan Anita Primastiwi, 2018). Perspektif normatif mengarah pada fokus pada norma keadilan dan kewajiban yang diinternalisasi orang. Ini menunjukkan kebutuhan untuk mengeksplorasi apa yang warga pikirkan dan untuk memahami nilai-nilai mereka. Sebaliknya, perspektif instrumental menganggap kepatuhan sebagai bentuk perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap faktor eksternal. Ini mengarah pada fokus pada jangkauan dan sifat sumber daya yang dimiliki otoritas untuk membentuk perilaku publik.

### **Machiavellinisme Hukum sebagai Pedoman dan Propaganda Hukum**

Machiavellianisme Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai alat propaganda hukum yang mampu membentuk persepsi masyarakat terhadap standar hukum. Dalam hal ini, Machiavellianisme digunakan untuk memanipulasi opini publik, menjamin penerimaan hukum, dan mendorong penerapan kebijakan. Dalam penerapan

Machiavellinisme Hukum harus memiliki suatu pedoman. Jika pemerintahan yang kuat adalah tujuan dari semuanya. Maka, Machiavellinisme harus disesuaikan dengan ideologi negara tersebut dan tidak boleh bertentangan terhadapnya. Pemerintahan dalam mengadopsi sistem Machiavellinisme menjadikannya sebagai sarana untuk menciptakan tujuan bangsa dengan cepat. Dalam penerapannya ada cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk dapat menjadikan masyarakatnya taat hukum. Propaganda merupakan mesin pencuci otak terkuat. Jika masyarakat sudah menjunjung tinggi norma serta aturan hukum, maka hukum pasti akan tegak (Lemons, Russel, Gobbles and Der Angriff. 1994).

Penguasaan akan pers dan media adalah juga merupakan langkah manipulatif cepat dari Machiavellinisme. Bukan berarti media tidak memiliki kebebasan menyiarkan sesuatu namun, peran Machiavellinisme sebagai *people control* dalam media hanya sekedar menyebarkan edukasi propaganda untuk mempengaruhi masyarakat.

Utilitarianisme dalam Machiavellinisme sangat kuat. Menjadikan masyarakat mengetahui arti timbangan (*scale*) bagaimana nilai yang baik dan buruk. Perilaku kebaikan pasti akan memaksimalkan kebahagiaan serta kesejahteraan seseorang. Menurut Joseph Goebbles propaganda yang baik harus memiliki akses tentang pengetahuan akan peristiwa dan pendapat publik. Yang berarti bahwasannya masyarakat harus sadar akan kondisi yang memprihatinkan atas negaranya sendiri yang gagal akan penegakan hukum. Sehingga kesadaran yang timbul itu juga akan menjadi benteng pelindung penegakan hukum yang kokoh (Leonard W. Doob, 1994).

### **Pengukuran kekuatan Machiavellinisme Suatu Negara**

Dalam mengukur kekuatan suatu negara menurut Machiavellianisme, ada beberapa indikator penting yang menunjukkan kemampuan negara tersebut untuk mempertahankan stabilitas dan menghadapi tantangan. Kemampuan taktis negara untuk menangani masalah internal dan eksternal adalah komponen penting. Negara yang mampu menangani konflik internal dan dengan efektif menangani masalah dari luar dapat dianggap memiliki kekuatan Machiavellian yang tinggi.

Salah satu komponen penting lain dalam mengukur kekuatan Machiavellian suatu negara adalah dinamika kekuasaan. Negara yang mampu mengelola dinamika ini dengan bijak dan menggunakan strategi Machiavellian untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan dalam era modern yang kompleks dapat dianggap memiliki kekuatan Machiavellianisme yang tinggi. Kemampuan sebuah negara untuk beradaptasi dan memanfaatkan perubahan zaman memungkinkannya untuk tetap relevan dan efektif dalam menerapkan rencana kekuasaannya. Terselenggaranya pemerintahan yang stabil dan dapat menerima kritik adalah tanda bagaimana Machiavellinisme hukum suatu negara sudah berjalan dengan baik serta mampu mempertahankan diri. Penerapan Machiavellinisme dengan pandangan utilitarian ini pada praktiknya sering dijumpai di negara-negara bersayap ideologi kanan.

Kekuatan fisik dan kontrol langsung tidak hanya menjadi fokus strategi Machiavellian. Penggunaan teknologi informasi, media, dan diplomasi modern merupakan bagian dari permainan kekuasaan kontemporer. Negara-negara yang cerdas menggunakan alat-alat ini untuk membentuk opini publik, memanipulasi narasi, dan memperkuat legitimasi pemerintah. Untuk memahami sejauh mana Machiavellianisme dapat bertahan dan berkembang, adalah penting untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana negara menghadapi dinamika ini. Salah satu komponen penting dalam memahami kekuatan suatu negara adalah kolaborasi strategis antara hukum dan Machiavellianisme. Hukuman yang diterapkan dengan bijaksana dan sesuai dengan pendekatan Machiavellian dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pemerintahan. Hukum dapat digunakan untuk mengontrol masyarakat dan mencapai tujuan politik dan keamanan. Sangat penting bagi komunitas ini untuk memastikan bahwa hukum

tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memanipulasi orang, tetapi juga menunjukkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diinginkan masyarakat.

Jika suatu negara memiliki pemerintahan yang kuat yang memiliki sifat Machiavellian, ukuran kekuatan negara menjadi lebih kompleks. Untuk menghindari penyalahgunaan atau ketidakadilan yang merugikan masyarakat, perlu diingat bahwa penggunaan kekuasaan ini harus dilakukan dengan alasan moral dan tanggung jawab.

### **Evaluasi bagaimana Pemerintah Machiavellinisme dapat Dipuji atau Disalahkan**

Yang perlu dilihat adalah bagaimana Machiavellinisme atau aturan hukum yang dibuat mampu menangani serta mengontrol masyarakatnya, bagaimana orang bereaksi terhadap pengalaman pribadi mereka dengan otoritas hukum. Yang sangat penting adalah dampak dari kebijakan ini terhadap pandangan tentang legitimasi otoritas hukum, karena legitimasi di mata publik merupakan prasyarat utama bagi efektivitas otoritas (Kramer, D. Larry, 2005). Perubahan legitimasi akan mempengaruhi sejauh mana orang mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka. Contoh aspek-aspek yang dianggap penting oleh masyarakat Misalnya, “bagaimana keputusan dibuat” dan “apa hasil keputusannya?” serta bagaimana mereka “diperlakukan secara adil?” Sejauh yang mereka rasakan.

Seperti sebelumnya, perbandingan perspektif normatif dengan perspektif instrumental. Menurut perspektif normatif, orang akan peduli dengan apakah mereka menerima hasil yang adil, dicapai melalui prosedur yang adil, bukan dengan hasil yang menguntungkan.

Perspektif normatif didukung sejauh orang menginginkan keadilan dari petugas polisi dan hakim, dan mengevaluasi otoritas tersebut berdasarkan apakah mereka mendapatkannya. Jika orang memiliki perspektif normatif seperti itu, polisi dan hakim dapat mempertahankan otoritasnya dengan bertindak dengan cara yang dipandang adil. Hal ini tentang hubungan warga negara dengan otoritas hukum telah didominasi oleh pandangan bahwa warga negara berkepentingan mendapatkan manfaat yaitu, dengan menerima hasil yang menguntungkan ketika berhadapan dengan petugas polisi dan hakim. Perspektif normatif alternatif diwakili oleh teori keadilan psikologis, yang berpendapat bahwa orang peduli tentang keadilan hasil (keadilan distributif) dan prosedur yang dengannya mereka sampai (keadilan prosedural). Masalah keadilan ini dilihat sebagai tindakan yang independen dari pengaruh kesukaan suatu hasil (Engle, Sally, 1990).

Dimungkinkan juga untuk mengidentifikasi perbedaan antara sampel kedua bagaimana masyarakat tidak mendapat apa yang mereka inginkan. Tidak tercapainya harapan terhadap penerapan. Juga otoritas penegak hukum yang buruk merupakan kegagalan dari Machiavellinisme Hukum sehingga muncul perilaku memberontak (rebellious) dari masyarakat yang lepas dari kontrol.

### **Batasan Machiavellinisme**

Sebenarnya Machiavellinisme tidak memiliki batasan terhadap nilai moral. Karena, arti konsep Machiavellinisme adalah melakukan segala sesuatu upaya yang dilakukan demi pemerintahan dan negara adalah sesuatu yang sah dan otoriter. Namun oleh karena hal tersebut juga dapat menjadikan Machiavellinisme itu hancur oleh masyarakatnya. Karena dalam perspektif normatif, orang yang menanggapi kesesuaian moral dari hukum dan seseorang pasti tahu perilaku mana yang tidak bermoral dan berlebihan yang kemudian menghancurkan sistem kontrol Machiavellinisme Hukum itu sendiri (Windha Aprillia, 2020).

Oleh karena itu Machiavellinisme yang baik adalah Machiavellinisme yang memiliki batasan terhadap moral. Bagaimana Machiavellinisme dapat memiliki pertimbangan utilitas akan masyarakatnya. Sehingga disamping Machiavellinisme hukum dapat mengontrol masyarakatnya untuk menuju kebermanfaatan dan kesejahteraan, masyarakat juga terima akan Machiavellinisme Hukum yang diterapkan (Jason J. Dahling, 2008). Menciptakan batasan

moral dalam Machiavellinisme, bagaimanapun, bukanlah tugas yang mudah. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip dan moralitas yang diagungkan oleh masyarakat. Pemimpin harus mempertimbangkan etika dan moralitas saat membuat keputusan. Ini menyebabkan dinamika yang kompleks antara kekuasaan, etika, dan keinginan masyarakat. Dalam memasuki lanskap moralitas dan etika dalam konteks ini adalah langkah penting. Memahami bahwa Machiavellinisme yang sukses tidak hanya mengandalkan kekuatan dan strategi, tetapi juga nilai moral masyarakat. Pemimpin masa depan harus mempertimbangkan tanggung jawab masyarakat mereka dalam menciptakan Enlightenment of Law dan mengawasi penerapan hukum dengan Machiavellian. Ini melibatkan kesadaran bahwa kekuasaan yang tidak terbatas tanpa batasan moral dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menghasilkan ketidakstabilan.

#### D. Kesimpulan

Pada dasarnya Machiavellianisme hukum mempelajari hukum dalam konteks sosial, tertentu dan empiris pengaruh timbal balik hukum dengan masyarakat yang menganggap sangat penting. Machiavellianisme hukum sebagai kontrol masyarakat, dalam arti bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan baik. Kontrol sosial merupakan kondisi yang seimbang dalam masyarakat, bertujuan untuk menciptakan keadaan yang harmonis antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana pemaksaan yang melindungi warga negara dari tindak dan ancaman yang membahayakan diri dan harta bendanya.

Machiavellinisme adalah pedoman yang kuat, yang bersama dalam sistem yang kuat adalah tujuan dari semuanya. Pemerintahan dalam mengadopsi sistem Machiavellinisme adalah sarana untuk menciptakan tujuan bangsa dengan cepat. Utilitarianisme dalam Machiavellinisme sangat kuat, yang bersama akan mengetahui arti nilai yang baik dan buruk. Perilaku kebaikan pasti akan memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang.

Machiavellinisme Hukum ada untuk menangani dan mengontrol masyarakatnya, dan menghasilkan otoritas hukum yang berdasarkan legitimasi di mata publik merupakan prasyarat utama yang efektivitas otoritas. Perbandingan perspektif normatif dan perspektif instrumental adalah meningkatkan keadilan yang adil, dicapai melalui prosedur yang adil, bukan hasil yang menguntungkan. Perspektif normatif didukung sejauh orang menginginkan keadilan dari petugas polisi dan hakim, dan mengevaluasi otoritas tersebut berdasarkan apakah mereka mendapatkannya. Hal ini tentang hubungan warga negara dengan otoritas hukum telah didominasi oleh pandangan bahwa warga negara berkepentingan mendapatkan manfaat yang menerima hasil yang menguntungkan ketika berhadapan dengan petugas polisi dan hakim. Perspektif alternatif diwakili oleh teori keadilan psikologis, yang berpendakan keadilan hasil (keadilan distributif) dan prosedur yang sampai (keadilan prosedural).

#### Referensi

- Auerbech, Jerold S. *Justice Without Law?*, (Oxford: Oxford University Press, 2002) hlm.6.
- Aurelius, Ata Luon dan Anita Primastiwi. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Machiavellianisme, Kolektivisme, Dan Etika Terhadap Niat Melakukan Pengungkapan Kecurangan (Whistleblowing). *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen* Vol. 4, No. 1
- Christie, Richard. *Studies in Machiavellianism*. New York: Academic Press, 2013.
- Engle, Sally,. *Getting Justice and Getting Even : Legal Consciousness among Working-Class Americans*. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
- Fredrick Schauer, *The Force of Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 2015) hlm.2.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Diedit oleh Tarmizi. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- James Burnham, *The Machiavellians: Defenders of Freedom*. Ashland: Blackstone Audiobooks, 2013.
- Jason J. Dahling. (2008) "The Development And Validation Of A New Machiavellianism Scale" *Journal of Management* #35, pp. 219-257 Version
- Jeremy Waldron. *The Law*. New York: Routledge, 1990.
- Kramer, D. Larry, *The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Lemons, Russel, *Gobbles and Der Angriff*. Kentucky: The University Press of Kentucky, 1994.
- Leonard W. Doob, *Gobble's Principles of Propaganda*. Kentucky: The University Press of Kentucky, 1994.
- Niccolo Machiavelli. *The Prince; Sang Penguasa*, Trans. Natalia (Surabaya: Ecosystem Publishing, 2018).
- Penticuff, Logan Taylor, "The Exploration of Machiavellianism". PhD diss., Eastern Kentucky University, Kentucky.
- Tofiq, Tri Agung dan Dwi Mulyani. (2018). Analisis Pengaruh Sifat Machiavellianisme, Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Faktor Situasional Dan Locus Of Control Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 1(4).
- Tyler, Tom R., *Why People Obey the Law*. New Jersey: Princeton University Press, 2006.
- Tyler, Tom R. *Trust in the Law: Encouraging Public Cooperation with the Police and Courts*. New York: Russell Sage Foundation, 2002.
- Windha Aprillia. (2020) *The Dark Triad and Ethical Behavior*. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 173.
- Zamir, Eyal. *Behavioral Law and Economics*. Oxford: Oxford University Press, 2018.